

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMAIT Iqra' Kota Bengkulu
Kelas/Semester : XII Ganjil
Tema : Teks Editorial
Sub Tema : Menganalisis struktur teks editorial
Pembelajaran ke : 8
Alokasi waktu : 10 menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan induktif dan metode diskusi kelompok tanya jawab, serta penugasan, peserta didik dapat menelaah struktur teks editorial dengan kritis, kreatif, dan rasa ingin tahu.

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan awal (alokasi waktu 2 menit)

- Peserta didik merespon salam
- Peserta didik mengawali pembelajaran dengan berdoa
- Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai
- Peserta didik menerima informasi tentang hal-hal yang akan dipelajari, metode, dan media, langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran

Kegiatan inti (alokasi waktu 6 menit)

- Peserta didik mengamati contoh teks editorial
- Peserta didik memunculkan berbagai pertanyaan tentang struktur teks editorial
- Peserta didik secara kreatif mencari informasi dari berbagai sumber untuk menemukan jawabannya
- Peserta didik mendiskusikan temuannya secara berkelompok
- Peserta didik merumuskan hasil diskusinya

Kegiatan penutup (alokasi waktu 2 menit)

- Peserta didik memberikan kesimpulan materi yang telah dipelajari
- Guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi siswa
- Peserta didik menutup pembelajaran dengan berdoa
- Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya

C. PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Teknik Penilaian:

- a. Penilaian sikap : Observasi/pengamatan
- b. Penilaian pengetahuan : tes tertulis
- c. Penilaian keterampilan : Unjuk kerja/praktik/portofolio

2. Bentuk Penilaian:

- a. Observasi : lembar pengamatan aktivitas peserta didik

- b. Tes tertulis : uraian dan lembar kerja
 - c. Unjuk kerja : lembar penilaian produk
3. Penilaian pengetahuan :

Bacalah teks editorial berikut dengan cermat!

Judul : Pilkada Tanpa Politik Identitas

Pemilihan kepala daerah atau pilkada tak pernah lepas dari adanya praktik politik uang, identitas, ujaran kebencian, penyebaran hoaks serta kampanye hitam. Meski kelima faktor tersebut tak muncul dalam kurun satu waktu pelaksanaan pesta demokrasi setidaknya ada dua yang tetap ada yaitu politik uang serta politik identitas selalu ada.

Dalam praktik politik identitas nantinya bisa muncul hoaks, ujaran kebencian, lalu kampanye hitam sebagai turunannya. Politik identitas yang bersandar dengan SARA (suku, agama, ras, serta antargolongan). Berbagai atribut tersebut sesungguhnya tidak memiliki kaitan dengan kualitas si calon pemimpin. Tetapi, hal tersebut sangat mudah digunakan guna mengaburkan pemilih dari objektivitas.

Efek yang paling ekstrim dari politik identitas yaitu adanya perpecahan di masyarakat sampai muncul berbagai konflik sosial. Kohesi yang terbangun dari spirit Bhinneka Tunggal Ika akan rontok dan membutuhkan waktu lama untuk pulih.

Politik uang serta politik identitas tak ubahnya mental korup yang ada dalam berdemokrasi telah begitu mengakar sampai sulit dikikis. Namun, tak berarti kita lantas menyerah serta hanya membiarkannya.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pilkada sudah mengatur larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf (b) menyebutkan kampanye dilarang untuk menghina agama, seseorang, ras, suku, golongan calon gubernur atau partai politik.

Juga di dalam Pasal 69 huruf (c) mengatur larangan dalam mengadakan kampanye dengan memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.

Sanksi tegas juga telah diatur di dalam Pasal 187 ayat (2). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan penyelenggaraan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 dan seterusnya akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau yang paling lama 18 bulan dan atau dengan denda paling sedikit Rp600.000 atau maksimal Rp6.000.000.

Kemudian mengapa politik identitas masih tetap marak dan bahkan pernah brutal seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan 2019? Tentu pembuatan aturan saja tak akan cukup. Butuh penegakan hukum guna meredam praktik yang mampu mencoreng demokrasi. Sanksi juga jangan sampai hanya menghiasi lembaran peraturan sampai irit dijatuhkan.

Hal ini semua adalah kerja yang berkelanjutan dari penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum. Hal itu juga memerlukan partisipasi masyarakat guna turut mengawasi dan juga wawas diri.

Pilkada 2020 dengan pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 9 Desember mendatang bukan hanya akan menghadapi kerawanan politik uang serta politik identitas. Pandemi covid-19 yang terjadi juga menyeruak ke posisi paling atas kerawanan pilkada. Berarti kerja penyelenggaraan serta pengawasan pilkada akan semakin berat.

Di sisi lain, pemilih memperoleh momentum dalam memilih calon pemimpin daerah yang paling mumpuni dalam menghadapi krisis semacam wabah penyakit. Para pasangan calon juga harus tampil dengan menyiapkan gagasan inovatif, khususnya dalam menangani pandemi covid-19.

Tugas pemilih dalam mempelajari betul rekam jejak para pasangan calon serta menyimak beragam gagasan mereka. Bukannya malah menyibukkan diri larut pada hasutan berbasis SARA, atau yang lebih buruk adalah ikut menyebarkannya.

Pilkada tahun 2020 harus bebas dari adanya praktik politik identitas yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, tidak boleh dibiarkan pemakain bahasa, narasi, atau simbol yang dapat membahayakan persatuan & kesatuan masyarakat.

Sumber : Koran Media Indonesia edisi 09 September 2020 yang diunggah oleh website <https://www.yuksinau.id/teks-editorial/contoh/>

Setelah membaca teks editorial di atas, tentukanlah isu aktual dan struktur (tesis, argumen, penegasan ulang) dengan menyertakan kutipan kalimat untuk setiap bagian! Tulislah jawabanmu ke dalam tabel di bawah ini!

Isu aktual	Tesis	Argumentasi	Penegasan ulang	Alasan

RUBRIK PENILAIAN

Soal	Aspek yang Dinilai	Skor
1	Peserta didik mampu menganalisis 3 struktur teks editorial dengan benar	100
	Peserta didik mampu menganalisis 2 struktur teks editorial dengan benar	75
	Peserta didik mampu menganalisis 1 struktur teks editorial dengan benar	50
	Peserta didik tidak menganalisis aspek kebahasaan kalimat retorik/ salah semua	0

Bengkulu, 05 Januari 2022

Sri Dewi Aprianti,S.Pd.
NIPY 199104252016012126